EKOSIDA DALAM PERSPEKTIF *EXTRA ORDINARY CRIME*

Aman Pratama

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

*Korespondensi : amanpratama@mail.ugm.ac.id

Abstract

Environmental destruction, known as ecocide, has become a global concern over the past few decades. The term ecocide refers to severe environmental damage resulting from actions that can be categorised as intentional crime or negligence. The concept was introduced by American biologist Arthur Galston in 1970. In the context of environmental law, ecocide includes destructive acts such as nuclear explosions, use of chemical weapons in violation of international law, destruction of natural forests, and pollution that threatens populations. This research aims to evaluate whether ecocide can be categorised as an extraordinary crime and its implications in the context of international and national law. There is debate in the literature and academic discussions regarding the relevance of classifying ecocide as an extraordinary crime. This research adopts the theory of gross human rights violations and the extraordinary crime theory to evaluate the legal status of ecocide as a crime involving a widespread and systematic attack on the environment. This research applies a normative juridical approach by analysing primary and secondary legal materials. It is hoped that the results of this research will provide a deeper understanding of the legal status of ecocide as an extraordinary crime and its impact in an increasingly complex international and national legal framework.

Keywords: *Ecocide, Extra Ordinary Crime, Gross Human Rights Violations*

Abstrak

Kerusakan lingkungan, dikenal sebagai ekosida, telah menjadi perhatian global selama beberapa dekade terakhir. Istilah ekosida merujuk pada kerusakan lingkungan parah yang diakibatkan oleh tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang disengaja atau kelalaian. Konsep ini diperkenalkan oleh ahli biologi Amerika Serikat, Arthur Galston, pada tahun 1970. Dalam konteks hukum lingkungan, ekosida mencakup tindakan merusak seperti ledakan nuklir, penggunaan senjata kimia yang melanggar hukum internasional, perusakan hutan alam, dan polusi yang mengancam populasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah ekosida dapat dikategorikan sebagai *extraordinary crime* dan implikasinya dalam konteks hukum internasional dan nasional. Terdapat perdebatan dalam literatur dan diskusi akademis mengenai relevansi klasifikasi ekosida sebagai *extraordinary crime*. Penelitian ini mengadopsi teori pelanggaran berat hak asasi manusia (*theory of gross human rights violations*) serta teori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime theory*) untuk mengevaluasi status hukum ekosida sebagai tindakan kejahatan yang melibatkan serangan yang bersifat luas dan sistematis terhadap lingkungan. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Diharapkan hasil penelitian ini

akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai status hukum ekosida sebagai *extraordinary crime* dan dampaknya dalam kerangka hukum internasional dan nasional yang semakin kompleks.

Kata Kunci : Ekosida, Kejahatan Luar Biasa, Pelanggaran HAM Berat

PENDAHULUAN

Ekosida dalam konteks hukum lingkungan internasional, merujuk pada kerusakan lingkungan yang melibatkan perbuatan kejahatan yang disengaja atau lalai, menyebabkan perubahan signifikan yang sulit atau tidak dapat dipulihkan. Menurut Konvensi Modifikasi Lingkungan (*Environmental Modification Convention*), tindakan kejahatan lingkungan dapat dikategorikan sebagai ekosida jika menghasilkan kerusakan parah, meluas, atau berkelanjutan terhadap lingkungan hidup. Contoh tindakan ini mencakup ledakan nuklir, penggunaan senjata kimia ilegal, perusakan hutan alam, dan polusi serius yang mengancam kelangsungan hidup populasi. Kerusakan lingkungan ini, yang bertentangan dengan prinsip hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, membawa dampak signifikan terhadap kehidupan manusia.

Bukti kerusakan lingkungan yang tidak dapat diabaikan, seperti kenaikan suhu bumi sebesar 0,8 derajat C dalam 200 tahun terakhir akibat Revolusi Industri dan kepunahan satu juta spesies dalam 50 tahun terakhir, menunjukkan dampak serius dari aktivitas manusia. Di Indonesia, kerusakan lingkungan meningkat dengan kejadian banjir, longsor, kebakaran hutan, dan pencemaran air dan udara. Bencana ekologi, seperti kebakaran hutan dan banjir, tidak hanya merugikan ekonomi, menciptakan konflik agraria, dan melanggar HAM, tetapi juga menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk tegas menyatakan bahwa ekosida merupakan *extraordinary crime*, meskipun perdebatan seputar kualifikasinya memerlukan analisis normatif yang mendalam, agar dapat mencegah dan menanggulangi pelanggaran HAM di bidang ekologi dan lingkungan serta merumuskan kebijakan yang efektif.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Ekosida

Secara terminologi, istilah ekosida memiliki asal usul dari kata *eco*, yang merujuk pada habitat, lingkungan, dan semua yang berkaitan dengan tempat tinggal, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, udara, air, dan matahari. Sementara itu, kata *cide* berasal dari bahasa latin *cedere*, yang memiliki makna menghancurkan atau memusnahkan. Ekosida, dalam arti harfiahnya, merujuk pada pembunuhan lingkungan, adalah sebuah gagasan yang mungkin dianggap radikal, namun bagi para aktivis, gagasan ini dianggap sebagai konsep yang masuk akal. Eksploitasi yang berlebihan terhadap lingkungan dan sumber daya alam, yang mengakibatkan kematian dan kerugian bagi manusia dan makhluk hidup, dikenal sebagai ekosida atau kejahatan lingkungan dalam kerangka hukum

lingkungan internasional. Salah satu aspek peraturan yang sangat penting adalah ketentuan mengenai kejahatan lingkungan atau ekosida.

Diskursus internasional melalui konferensi resmi yang diadakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB), upaya untuk mengakui ekosida sebagai salah satu kejahatan internasional tidak berhasil. Menurut Polly Higgins, ekosida adalah kerusakan, penghancuran, atau kehilangan ekosistem di suatu wilayah tertentu, baik akibat tindakan manusia maupun faktor lain, yang mengakibatkan berkurangnya kenikmatan perdamaian penduduk di wilayah tersebut. Walaupun gagal mendapatkan pengakuan di tingkat internasional, beberapa negara telah mengambil tindakan dengan menginkorporasikan ekosida ke dalam hukum nasional mereka. Contohnya, Vietnam dan Rusia telah melibatkan ekosida sebagai *Crime Against Peace*, sementara beberapa negara seperti Armenia, Belarusia, Republik Moldova, Ukraina, dan Georgia telah mengklasifikasikannya sebagai *Crime Against Peace*. Di Georgia, kejahatan ekosida dapat dihukum dengan penjara selama empat belas hingga dua puluh tahun atau penjara seumur hidup. Selain itu, tiga negara lainnya, yaitu Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan, telah mengambil langkah serupa.

Hukum Lingkungan Internasional mengenalkan konsep ekosida yang pertama kali diperkenalkan dalam *Stockholm Conference on Human Environment* tahun 1972, yang kemudian menjadi dasar dari Pembentukan *Stockholm Declaration*. Pada tahun 1978, *International Law Commission (ILC)* memasukkan perusakan lingkungan (*damage to environment*) ke dalam *Draft articles on State Responsibility and International Crime*. Ekosida dapat diidentifikasi sebagai salah satu bentuk kejahatan internasional berdasarkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, baik yang disengaja maupun kelalaian, dengan mengacu pada kriteria:

- 1) Ekosida teridentifikasi berdasarkan kerusakan ekologis yang serius, luas, dan abadi atau sulit dipulihkan. Tingkat seriusnya diperlihatkan oleh besarnya kerusakan yang sistematis, yang dapat berdampak pada manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti dalam perusakan hutan hujan global, bencana nuklir Chernobyl, atau kehilangan aset alam unik, seperti yang terjadi di Prince William Sound setelah tumpahan minyak Exxon Valdez. Cakupan geografis yang luas dan sulitnya pemulihan yang sangat diperlukan untuk mengembalikan kondisi semula, bahkan mungkin tidak dapat dipulihkan sama sekali.
- 2) Ekosida memiliki konsekuensi internasional yang signifikan. Contoh-contoh bencana lingkungan seperti yang dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa kriteria ekosida di tingkat internasional terpenuhi. Ekosida mengancam kepentingan dan nilai penting bagi komunitas global, termasuk kelangsungan hidup, kesehatan, dan sumber daya alam yang sangat penting. Untuk mencegah atau mengatasi hal ini, kerja sama internasional yang mencakup aspek politik, sosial, ekonomi, dan teknologi perlu dilakukan secara efektif.
- 3) Selain kerusakan ekologis yang serius, pemborosan juga merupakan elemen yang menjadikan ekosida sebagai kejahatan moral yang patut dan dapat dianggap sebagai kejahatan internasional. Contoh seperti penyalahgunaan sumur minyak Kuwait selama Perang Teluk, perusakan hutan hujan, dan pembuangan limbah beracun seringkali merupakan hasil dari faktor politik, ekonomi, dan sosial yang kompleks.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini mengkaji dan menelaah apakah ekosida dapat dikategorikan sebagai *extraordinary crime* dan mengidentifikasi konsekuensi hukumnya jika diperlakukan sebagai *extraordinary crime*. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemahaman dan penormaam terhadap ekosida, yang saat ini belum dianggap sebagai *extraordinary crime*, melainkan hanya sebagai kejahatan konvensional. Dalam konteks teori pelanggaran HAM berat dan kejahatan luar biasa, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana ekosida dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan *extraordinary crime*. Melalui metode yuridis normatif, penelitian mengambil pendekatan kritis untuk menilai kesesuaian aturan hukum, doktrin hukum, dan aspek teoritisnya dengan prinsip-prinsip hukum dan konsep-konsep hukum, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekosida Dalam Perspektif Teori Kejahatan Luar Biasa (*Extraordinary Crime Theory*)

Perkembangan kejahatan yang melebihi Undang-Undang menjadi fenomena universal dengan peningkatan jumlah dan perubahan metode yang merugikan. Di Indonesia, konsep kejahatan luar biasa melibatkan korupsi, narkoba, psicotropika, dan pencemaran lingkungan, meskipun tanpa kategori resmi dalam hukum pidana. Pengidentifikasian kriteria kejahatan luar biasa sering memunculkan perdebatan karena kurangnya standarisasi. Secara teoritis, kejahatan luar biasa dapat dihubungkan dengan kejahatan serius yang mengancam keamanan, perdamaian, dan kesejahteraan manusia. Kriteria melibatkan tindakan terencana, terorganisir, dan sistematis dengan dampak signifikan. Di Indonesia, pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, terorisme, penyalahgunaan narkoba, dan perusakan lingkungan dianggap sebagai bentuk kejahatan luar biasa yang dilakukan secara sengaja dan melibatkan dampak massif. Menurut Winarno, *extraordinary crime* tidak hanya merusak aspek ekonomi, tetapi juga berdampak pada ekologi, sosial, dan budaya suatu negara. Dalam konteks kejahatan lingkungan, prinsip *extraordinary crime* dapat diterapkan pada kejahatan yang berkaitan dengan ekologi. Meskipun dampaknya tidak selalu langsung, dalam jangka waktu tertentu, kerusakan lingkungan dapat mengganggu ekosistem makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Penting untuk memahami bahwa kesejahteraan manusia sangat tergantung pada lingkungan, dan kerusakan lingkungan dapat mengancam kelangsungan hidup manusia, serta berdampak pada ekonomi, kesehatan, aspek sosial, dan budaya.

Menurut Muladi, nomenklatur kejahatan luar biasa ditetapkan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang mengadopsi norma-norma dari Statuta Roma. Dalam undang-undang ini, kejahatan luar biasa merujuk pada pelanggaran HAM berat yang terbatas pada dua bentuk, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Definisi kedua bentuk kejahatan tersebut sama dengan yang diatur dalam Pasal 6 dan 7 Statuta Roma. Sukardi menyebutkan bahwa *extraordinary crime* sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat dari suatu tindakan atau perbuatan yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan, nasional maupun internasional.

Karakteristik kejahatan luar biasa yang dikemukakan oleh Eddy O.S Hiariej dalam

pengkualifikasian kejahatan luar biasa tidak mutlak harus dikodifikasi dalam Undang-Undang tindak pidana khusus. Misalnya, jika terjadi pembaharuan dalam Undang-Undang tindak pidana khusus dan kemudian dimasukkan ke dalam KUHP Nasional, hal ini tidak akan mempengaruhi sifat *extraordinary crime* itu sendiri. Menurutnya, ada 7 kriteria *extraordinary crime* :

- 1) Dampak viktimisasinya luas
- 2) Merupakan asal dari tindak pidana pencucian uang
- 3) Berakar dari suatu perjanjian internasional
- 4) Dilakukan secara terorganisasi dan memanfaatkan teknologi informasi
- 5) Memerlukan lembaga khusus untuk penanganan
- 6) Lembaga khusus tersebut memiliki kewenangan yang besar
- 7) Merupakan objek sesuatu yang keji (*people condemnation*)

Fenomena kerusakan lingkungan yang melibatkan penghancuran atau degradasi ekosistem secara besar-besaran, dapat dengan relevan dianggap *sebagai extraordinary crime* berdasarkan kriteria yang diajukan oleh Eddy O.S Hiariej. *Pertama*, Dampak viktimisasinya yang luas mencakup pengaruh merugikan terhadap berbagai jenis makhluk hidup dan lingkungan secara keseluruhan. *Kedua*, ekosida dapat diasosiasikan dengan asal-usul dari tindak pidana pencucian uang, baik melalui skema keuangan ilegal atau praktik bisnis yang merugikan secara finansial. *Ketiga*, bersumber dari perjanjian internasional yang secara tersirat telah dimuat dalam klasifikasi pelanggaran HAM berat meskipun Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma namun mengadopsi norma internasional secara kongkrit dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan telah menjadi fokus dalam hukum internasional. *Keempat*, Tindakan merusak lingkungan juga dapat dilakukan secara terorganisasi, mungkin melibatkan organisasi atau praktik bisnis tertentu yang memanfaatkan teknologi untuk mencapai tujuan mereka. *Kelima*, Penanganan ekosida kemungkinan memerlukan lembaga khusus yang memiliki kewenangan dan keahlian untuk menanggapi serta mencegah tindakan tersebut. *Keenam*, Lembaga Komnas HAM yang menangani ekosida memiliki kewenangan yang cukup untuk menindak pelaku dan mencegah tindakan serupa di masa depan. *Ketujuh*, Tindakan yang merusak lingkungan sering kali mendapat kecaman publik karena dampaknya yang merugikan terhadap ekosistem dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, seiring dengan konsep *extraordinary crime*, ekosida dapat dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan perhatian dan respons khusus untuk melindungi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan manusia.

Kejahatan masa kini telah mengalami perubahan, tidak selalu mengikuti cara-cara lama yang telah ada selama bertahun-tahun sepanjang sejarah bumi. Dalam banyak jenis kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, ada yang memiliki dampak terhadap keselamatan dan perdamaian dunia, yang dikenal sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Awalnya, konsep kejahatan luar biasa hanya mencakup empat jenis kejahatan yaitu kejahatan perang, kejahatan agresif, kejahatan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, perkembangan kejahatan saat ini menunjukkan adanya beberapa jenis kejahatan terbaru yang dianggap setara dengan keempat jenis kejahatan tersebut, salah satunya adalah ekosida.

Ketika kita melihat kembali karakteristik dari kejahatan luar biasa itu sendiri, maka ekosida sudah memenuhi syarat yang telah diajukan yaitu:

- 1) *The criminal acts committed* (Tindakan kriminal yang dilakukan) merupakan perbuatan yang keji dan kejam, *deeply shocking the conscience of humanity* (mengguncangkan hati nurani kemanusiaan), dan dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional (*a threat to international peace and security*).
- 2) Terdapat unsur kesengajaan, terorganisir, sistematis, dan meluas (*intentionality, organization, systematicity, and widespread conduct*) untuk menimbulkan kematian atau akibat-akibat yang sangat serius lainnya (*extremely grave consequences*).
- 3) Akibat yang ditimbulkan dari tindakan pidana itu sangat serius terhadap negara atau masyarakat luas (*highly detrimental to the state or the broader society*), seperti mengganggu ketertiban umum, melibatkan jumlah sumber daya yang sangat besar (*involving a substantial amount of resources*), dan dilakukan dengan cara yang sangat keji di luar norma kemanusiaan (*extremely inhumane and cruel manner*), sehingga juga membahayakan keamanan negara (*endangering the security of the state*).

Polly Higgins dan Stuart Ford memandang ekosida sebagai kejahatan serius yang setara dengan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Menurut Higgins, ekosida memiliki dampak yang meluas dan dapat mengancam perdamaian global, dengan tanggung jawab pidana yang lebih berat terhadap pelaku. Ford mengaitkan ekosida dengan kejahatan luar biasa yang dapat dihukum mati, sementara Gillian Caldwell mendukung penambahan ekosida ke dalam kategori ini untuk mengakhiri impunitas. Konsep ini menciptakan dasar hukum yang kuat untuk menangani kejahatan lingkungan yang disebabkan oleh tindakan manusia atau korporasi yang disengaja.

Berdasarkan data dari WALHI, sekitar 159 juta hektar lahan di Indonesia telah dikuasai oleh korporasi melalui izin investasi industri ekstraktif, mencakup lebih dari 80% wilayah daratan dan hampir 30% wilayah laut. Di sisi lain, Polly Higgins menyoroti ketidakmampuan hukum lingkungan di banyak negara sebagai dasar untuk menangani kejahatan ekosida, yang disebabkan oleh fokus pembuat peraturan pada pertimbangan ekonomis yang sering mengesampingkan aspek lingkungan. Dampak ekosida, seperti kehilangan hutan sekitar 680 ribu hektar setiap tahun di Indonesia menurut IPBES 2018, tidak hanya merugikan wilayah lokal, tetapi juga pulau-pulau terdekat. Selain itu, dampak meluas seperti tercemarnya 101 dari 105 sungai di Indonesia, yang dilaporkan KLHK, menunjukkan bahwa ekosida memiliki konsekuensi serius terhadap lingkungan dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, Higgins menegaskan bahwa perusakan lingkungan bukanlah pelanggaran biasa, melainkan kejahatan luar biasa yang berpotensi mengancam perdamaian dan keberlangsungan hidup manusia, memberikan urgensi untuk mengubah pandangan terhadap kejahatan ekosida.

Ekosida Dalam Perspektif Teori Pelanggaran HAM Berat (*Theory Of Gross Human Rights Violations*)

Pelanggaran HAM berat atau biasa dikenal dengan sebutan *serious human rights violations* merupakan sebuah istilah yang tidak lazim dalam kosa kata hukum internasional. Sebenarnya, konsep yang telah lama dikenal dan digunakan oleh komunitas internasional adalah *gross violations of human rights* atau pelanggaran berat HAM, yang pertama kali muncul dalam konteks ECOSOC pada tahun

1967. Pendapat lain terkait konsep *gross violations of human rights* diungkapkan oleh Thomas van Boven dalam pembentukan “*Basic Principle and Guidelines on The Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*” (Prinsip dan Pedoman Dasar mengenai Hak untuk Memperoleh Ganti Rugi bagi Korban Pelanggaran Berat Hukum Internasional dan Pelanggaran Serius Hukum Humaniter Internasional) tahun 2005. Van Boven mengemukakan pandangan bahwa kejahatan internasional yang tercantum dalam Statuta Roma, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi, seharusnya juga dimasukkan dalam kategori pelanggaran berat HAM.

Meskipun terdapat perbedaan penafsiran mengenai klasifikasi *extraordinary crime*, para pakar umumnya sepakat bahwa delik-delik tersebut, sejauh berdampak luas, sistematis, dan menimbulkan kerugian masif, dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. C. de Rover menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) melibatkan tindakan atau kelalaian negara yang melanggar norma-norma HAM internasional, dan meskipun tidak ada regulasi yang spesifik, Undang-Undang Pengadilan HAM mengatur pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, diusulkan untuk mengkategorikan ekosida sebagai *extraordinary crime*. Menurut Munadjat Danusapoetro, lingkungan hidup mencakup seluruh entitas, termasuk manusia, dan pemenuhan lingkungan hidup yang baik dianggap sebagai hak asasi manusia mutlak. Amandemen keempat UUD NRI 1945 memperkuat konstitusionalitas kebijakan ekonomi dan meningkatkan status lingkungan hidup dalam konteks hak asasi manusia, sejalan dengan pandangan Handrawan bahwa lingkungan adalah bagian integral dari perlindungan hak sipil sebagai hak dasar dan fundamental. Pengaruh kejahatan terhadap kemanusiaan dapat mengancam ketertiban dan keamanan, terutama jika negara tidak melakukan pengklasifikasian terhadap kejahatan luar biasa, menyebabkan kekosongan dan ketidakjelasan dalam kategorisasi kejahatan tersebut. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI mengenai konsep negara hukum berkaitan dengan perlindungan HAM menjadi penting, dan jika Negara Indonesia tidak mengkategorikan kejahatan lingkungan sebagai *extraordinary crime*, hal ini dapat merongrong konsep negara hukum. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Handrawan bahwa negara hukum bergantung pada perlindungan hak asasi manusia dan sistem demokrasi sebagai pilar utama.

Kejahatan luar biasa, yang juga dikenal sebagai *extraordinary crimes*, telah mengalami perkembangan seiring waktu dan beragam dalam masyarakat. Meskipun bentuknya telah berubah seiring perkembangan zaman, termasuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia, kejahatan luar biasa merupakan tindakan yang bertujuan untuk merampas hak asasi manusia lain. Penulis mencatat bahwa kejahatan lingkungan adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM berat yang merupakan kejahatan luar biasa. Meskipun dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, kerusakan lingkungan ini akan secara perlahan namun pasti menghasilkan dampak yang merugikan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kematian massal dan mengancam kelangsungan hidup manusia.

Dari sudut pandang dampaknya, ada tiga unsur yang dimaksudkan untuk melawan ekosida, seperti yang diuraikan oleh M. R. Saleh pada tahun 2020:

- 1) Dampak yang sangat serius dan berlangsung dalam jangka waktu yang relatif panjang terhadap integritas dan fungsi kehidupan yang tidak dapat dipulihkan.
- 2) Terdapat kerusakan permanen yang tidak dapat dikembalikan seperti semula terhadap integritas dan fungsi kehidupan.
- 3) Adanya penyimpangan, baik yang bersifat fisik maupun psikis pada manusia.

Berdasarkan kebenaran korespondensi yang diperoleh pada bulan Mei 2023, konsentrasi CO₂ (*carbon dioxide*) dalam atmosfer mencapai 420,00 bagian per juta, dan suhu global telah meningkat sebesar 1,15 derajat Celsius dibandingkan dengan periode pra industri. Ini menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang paling serius di era saat ini. Salah satu isu lingkungan terkemuka yang kita hadapi saat ini adalah polusi udara luar ruangan. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa sekitar 4,2 hingga 7 juta orang diperkirakan meninggal setiap tahun akibat dampak polusi udara di seluruh dunia, dengan sembilan dari 10 orang menghirup udara yang mengandung polutan berlebihan. Di Afrika, pada tahun 2017, tercatat 258.000 orang meninggal akibat polusi udara luar ruangan, meningkat dari 164.000 pada tahun 1990, menurut UNICEF. Penyebab utama polusi udara berasal dari sumber-sumber industri dan kendaraan bermotor, serta emisi dari pembakaran biomassa dan kualitas udara yang buruk akibat badai debu.

Kerusakan lingkungan sebagai kejahatan pelanggaran HAM berat yang dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime* dapat menimbulkan terjadinya perubahan sistem tatanan sosial dan hukum yang berorientasi pada konflik horizontal dan vertikal di antara masyarakat, masyarakat dan pelaku usaha maupun masyarakat dengan negara sehingga dapat berdampak atau berimplikasi terhadap ketertiban dan keamanan di berbagai sektor untuk itu perlu kebijakan tatanan hukum baru dan keberanian pemerintah melalui pendekatan *political will* dalam proses legislasi untuk menyatakan dalam Undang-Undang baru bahwa kejahatan terhadap lingkungan yang dilakukan secara masif dan sistemik yang berdampak nasional merupakan kejahatan *extraordinary crime*.

Konsekuensi Ekosida Jika Digolongkan Sebagai *Extra Ordinary Crime*

Dalam konteks hukum internasional meskipun telah dipertimbangkan sebagai salah satu jenis kejahatan internasional oleh ILC, pada tahun 1998 ketika Statuta Roma mengenai Mahkamah Pidana Internasional (pengadilan internasional pertama yang memiliki yurisdiksi mengadili tindak pidana internasional dan bertujuan mengakhiri impunitas) dibuat, ekosida tidak dimasukkan sebagai jenis pelanggaran HAM yang dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional. Sehingga saat ini, sama sekali belum ada perjanjian internasional yang secara khusus memberikan definisi terhadap ekosida dan mekanisme pertanggungjawaban terhadap pelakunya. Hingga kini upaya untuk mengategorikan ekosida sebagai pelanggaran HAM dan menjadi bagian dari yurisdiksi universal terus dilakukan, misalnya dengan mengupayakan untuk mengintegrasikan ekosida ke dalam Statuta Roma dan mengakuinya sebagai jenis kejahatan kelima yang menjadi yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional untuk diadili. Sehingga konsekuensi dalam perspektif hukum internasional ketika ekosida dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime* maka akan menjadi bagian dari kewenangan atau yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional (*Internasional Criminal Court*) untuk mengadili para pelaku kejahatan luar biasa termasuk pelaku kejahatan ekosida.

Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengatur mekanisme terkait kejahatan HAM berat, namun tidak memberikan ketentuan khusus mengenai eco crime. Undang-Undang ini hanya mengatur kejahatan dan genosida terhadap kemanusiaan dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, menyebabkan Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma Tahun 1998. Ketidakhadiran kejahatan ekosida dalam kategori pelanggaran HAM berat di Indonesia disebabkan oleh kesamaan adopsi Undang-Undang Peradilan HAM dengan Statuta Roma. Sebagai hasilnya, ekosida tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM berat yang dapat diadili di pengadilan HAM nasional. Namun, jika ekosida dimasukkan ke dalam kerangka hukum Indonesia, hal ini akan memberikan kewajiban hukum kepada pemerintah untuk mencegah dan mengadili ekosida, menciptakan kepastian hukum terkait isu ini. Selama konsep ekosida tidak mendapat perhatian khusus di Indonesia, lembaga penegak hukum akan menghadapi kendala dalam menindak individu atau korporasi yang merusak lingkungan, memungkinkan korporasi untuk menggunakan kekuasaan dan sumber daya mereka untuk merusak lingkungan tanpa hambatan hukum.

Konsekuensi logis dari penerapan hukum nasional terhadap ekosida sebagai *extraordinary crime* adalah bahwa penanganan kasus semacam itu juga harus bersifat luar biasa, baik dalam hal struktur hukum maupun substansi regulasinya. Karakteristik *extraordinary* dalam kerangka hukum struktural mencakup aspek-aspek seperti materi hukum pidana yang mencakup tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan yang memiliki ciri-ciri yang luar biasa, terlihat dari sifat tindakan yang sangat tidak biasa, tingkat pertanggungjawaban yang di luar norma, dan hukuman yang di luar norma. Selain itu, dalam ranah hukum pidana formil, proses hukum seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penuntutan, dan bahkan putusan pengadilan juga harus bersifat *extraordinary* dalam hal aspek seperti lamanya penahanan, sistem peradilan yang bersifat *ad hoc* yang dapat melibatkan peradilan umum, meskipun tetap bersifat sementara (*ad hoc*) dalam karakteristiknya.

Dari berbagai literatur yang ada penulis dalam hal pengkategorian atau penggolongan kejahatan biasa menjadi kejahatan luar biasa juga dapat mempengaruhi beberapa hal terkait dengan muatan berat ringannya sanksi pidana (*strafmaat*) mekanisme penegakan yang berorientasi pada terjadinya pemberatan sanksi pidana terutama pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan ekosida. Dalam hal ini jika merujuk pada sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup yang tadinya hukuman bagi para pelaku kejahatan pidana penjara yang paling berat atau paling lama yaitu 10 tahun akan tetapi setelah di golongkan menjadi ekosida hukuman pidana penjaranya akan menjadi 20 tahun bahkan sampai pada hukuman mati tidak hanya dari segi sanksi dan tuntutan akan tetapi terkait dengan proses penyelidikan sampai pada proses persidangan akan berbeda dengan kasus biasa pada umumnya yang di mana penyelidik dari pelaku kejahatan luar biasa terkait dengan pelanggaran HAM berat dalam hal ini merupakan wewenang dari Komnas HAM, dan untuk tahapan penuntutan dilakukan oleh jaksa agung, dan proses persidangan menggunakan hakim peradilan umum ditambah dengan hakim *ad hoc* tidak hanya hal tersebut termasuk dengan tidak berlakunya daluwarsa untuk kejahatan tersebut, termasuk ekosida yang dikategorikan menjadi

kejahatan *extraordinary crime* karena penetapan atau pengklasteran tersebut mengacu pada pasal 46 Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Meskipun demikian hal tersebut tidak menjadi pengaruh terhadap pengklasteran ekosida sebagai *extraordinary crime*.

Perkembangan masalah lingkungan yang semakin memburuk dari waktu ke waktu, nampaknya belum diimbangi dengan penegakan hukum yang memadai, meskipun telah dibuat berbagai peraturan, termasuk dalam Undang-Undang Dasar yang menjamin hak atas lingkungan. H. Joni mengungkapkan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup adalah suatu jenis kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Artinya, kejahatan ini dianggap luar biasa dan memerlukan penanganan yang luar biasa, karena dampaknya yang luas terhadap beragam ekosistem lingkungan hidup di Indonesia.

KESIMPULAN

Ekosida dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa berdasarkan karakteristiknya yang mencakup tindakan keji, dampak massal pada ekosistem, ancaman terhadap perdamaian internasional, aspek sistematis dari tindakan tersebut, serta dampaknya yang merusak aspek ekologi, sosial, dan budaya suatu negara. Dengan demikian, ekosida memenuhi kriteria kejahatan luar biasa yang membutuhkan perhatian hukum yang serius. Hal ini dapat membawa implikasi dalam mengakhiri impunitas dan menegakkan tanggung jawab hukum bagi para pelaku ekosida guna melindungi lingkungan dan hak asasi manusia.

Konsekuensi hukum dari pengakuan ekosida sebagai kejahatan luar biasa membawa implikasi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan hukum baru terkait hukum pidana, baik dalam aspek formil maupun materiil, terutama dalam konteks kejahatan lingkungan. Hal ini menciptakan perlunya pendekatan yang berbeda dalam penanganan kejahatan lingkungan dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Dalam konteks ini, pengaturan hukum pidana formil (prosedur hukum pidana) dan materiil (substansi hukum pidana) perlu disesuaikan untuk mengatasi kejahatan lingkungan yang memiliki dampak luar biasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Gunakaya, Widiada. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi, 2017.
- Handrawan. *Pencabutan Hak Politik dalam Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Hatta, Muhammad. *Kejahatan Luar Biasa Extra Ordinary Crime*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2019.
- Hatta, Muhammad. *Kejahatan Luar Biasa Extra Ordinary Crime*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2019.
- Joni, H. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Sampit: Pustaka Pelajar, 2016.

- Muladi. *Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya terhadap Hukum Pidana Nasional*. Bandung: Alumni, 2011.
- Saleh, M. Ridha, *Ecocide: Melawan Pelanggaran Berat HAM di Indonesia*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2020.
- Sukardi. *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005.

Jurnal

- Anudiwanti ,Puja, Ahmad Hatim. "Edukasi Perlindungan Pelestarian Lingkungan Hidup di Masyarakat Desa Melalui Penguatan Pengaturan Tentang Ekosida." *Jurnal Dedikasi Hukum* 2, no. 3, 2022, 323.
- Ausath , Muhammad Ali. "Upaya Penerapan Ekosida sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria* 2, no. 1, 2022.
- Barakati, Morais. "Perspektif Konsep Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan." *Lex et Societatis* III, no. 8, 2015.
- Elcaputera, Arie, Dede Frastien. "Kajian Ecocide Terhadap Pertambangan Batubara Dalam Kawasan Hutan Pada Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu." *Bina Hukum Lingkungan* 1, 62–81, 2020.
- Gauger, Anja. *The Ecocide Project: Ecocide Is the Missing Crime Against Peace*. London: Human Right Consortium, University of London, 2013.
- Gray, Mark Allan. 1996. "The International Crime of Ecocide." *CWSL Scholarly Commons* 26, no. 2, 234–242.
- Hamzah, Mochmad Ridwan, "Ecocide Dan HAM Di Indonesia." *Wacana HAM* 3, no. 11, 2013.
- Higgins, Polly, et al. *Eradicating Ecocide: Exposing the Corporate and Political Practices Destroying the Planet and Proposing the Laws Needed to Eradicate Ecocide*. South West London: Shephard-Walwyn Publishers, 2010.
- Juliazka, Royan, Hans Giovanni. "Makalah: Urgensi Pemidanaan Ekosida." Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020.
- Kahfi, Ashabul. "Kejahatan Lingkungan Hidup." *Jurnal Al-Daulah* 3, no. 2, 208, 2014.
- Prahassacitta ,Vidya. "The Concept of Extraordinary Crime In Indonesia Legal System: Is The Concept An Effective Criminal Policy?" *Jurnal Humaniora* 7, no. 4, Oktober 2016.
- Sumigar, Benhard Ruben Fritz. "Pelanggaran Berat HAM dalam RUU KUHP: Tinjauan dari Hukum Internasional." *Jurnal Ilmiah Hukum* 11, no. 2, November 2020, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Warni, Rahmi. "Perlindungan Lingkungan Sebagai Bagian Dari Perlindungan HAM Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Internasional." Universitas Sumatera Utara, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik

Aman Pratama

Indonesia Tahun 165 Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208)

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Sumber Lainnya

EARTH.ORG. "15 Masalah Lingkungan Terbesar Tahun 2023." [https://earth-org.translate.google.com/translate?_sl=en&_tl=id&_hl=id&_pto=tc,](https://earth-org.translate.google.com/translate?_sl=en&_tl=id&_hl=id&_pto=tc)

Forest Digest. "Ecocide: An Unrecognized Environmental Crime." [https://www.forestdigest.com/detail/241/ekosida-kejahatan-lingkungan-yang-belum-diakui/.](https://www.forestdigest.com/detail/241/ekosida-kejahatan-lingkungan-yang-belum-diakui/)

Sophie Yeo. "Ekosida: Apakah Membunuh Alam Seharusnya Dipidana?" <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55714424>

WALHI. "Kondisi Lingkungan Hidup di Indonesia di Tengah Isu Pemanasan Global." <https://www.walhi.or.id/kondisi-lingkungan-hidup-di-indonesia-di-tengah-isu-pemanasan-global>